

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi dan manajemen untuk membobilisasi manusia, uang, dan bahan-bahan baku atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik.¹ Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi merupakan salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal. Dinas perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. penyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis dibidang, koperasi dan penanaman modal, pelaksanaan pembinaan organisasi dibidang, perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

Kewirausahaan dalam perkembangnya mengalami evolusi yang pesat. Pada mulanya kewirausahaan berkembang dalam bidang perdagangan, namun kemudian diterapkan di berbagai bidang lain seperti industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan institusi-institusi lain seperti lembaga pemerintah, perguruan tinggi,

¹Leonardus Saiman, *Kewirausahaan, Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 41

dan lembaga swadaya lainnya. Kewirausahaan tidak hanya dapat digunakan sebagai kiat-kiat bisnis jangka pendek tetapi juga sebagai kiat kehidupan secara umum dalam jangka panjang untuk menciptakan peluang. Di bidang-bisnis misalnya, perusahaan sukses dan memperoleh peluang besar karena memiliki kreatif dan inovasi. Melalui proses kreatif dan inovatif, wirausaha menciptakan nilai tambah barang dan jasa.²

Program Dinas PERINDAGKOP adalah pengembangan usaha agar bisnis dan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah industri perdagangan dan koperasi dan guna peningkatan kontribusi PDRB dan PAD, peningkatan promosi pemasaran dan kerjasama lembaga usaha perdagangan, menciptakan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi.

Peranan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah sangatlah diperlukan dan sangat menjadi acuan terhadap usaha kecil menengah karena dengan peranan pemerintah mereka akan bertanggungjawab dan berperilaku yang fokus terhadap kepuasan pelanggan, dan memberikan harga tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dengan adanya peranan PERINDAGKOP terhadap harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah usaha mikro kecil menengahpun tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan untuk kepentingan pribadi, seperti ingin memperoleh keuntungan yang besar, adapun peranan perindagkop sendiri harus sesuai supaya tidak ada yang merugikan satu sama lain.

²Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), 8

Dinas PERINDAGKOP sebagai badan usaha yang mengawasi terhadap UMKM, mengawasi. Harga yang ada di Kec. Serang sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh UMKM, Dengan tugas atau program kerja dinas **PERINDAGKOP** tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji atau meneliti tentang "*Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (PERINDAGKOP) Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Serang*".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah penelitian yakni berdasarkan fenomena yang terjadi diduga bahwa tingkat Dinas PERINDAGKOP terhadap Usaha mikro Kecil Menengah tidak sesuai dengan penghasilan yang di peroleh.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan terhadap UMKM
2. Masyarakat kurang mengenal adanya Dinas PERINDAGKOP

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh Dinas PERINDAGKOP terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah kota Serang.

2. Seberapa besar peranan Dinas PERINDAGKOP terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dinas PERINDAGKOP terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah kota Serang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan Dinas PERINDAGKOP terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut :

- 1) Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta wacana baru bagi perusahaan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak agar tidak terjadi kegagalan menjalankan usaha.

- 2) Bagi lembaga IAIN SMH Banten

Hasil penelitian ini dijadikan sebuahkajian ilmu pengetahuan guna pembangunan pada dunia pendidikan.

3) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala pengetahuan dan wawasan baik dalam kondisi nyata maupun teori.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Theodurus M.Tuanakotta dalam buku “Teori Akuntansi” (2000;152) Pendapatan secara umum didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan merupakan darah kehidupan dari perusahaan. Begitu pentingnya sangat sulit untuk mendefinisikan sebuah pendapatan sebagai unsur akuntansi pada diri sendiri. Pada dasarnya pendapatan merupakan kenaikan laba, seperti laba pendapatan ialah sebuah proses arus penciptaan barang dan/atau jasa oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu. Pada umumnya, pendapatan dinyatakan dalam satuan uang (moneter).³

Usaha adalah penciptaan kegiatan, dan atau berbagai aktifitas. Dengan kata lain berkewirausahaan adalah hal-hal atau upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan atau usaha atau aktifitas bisnis atas dasar kemauan sendiri dan atau mendirikan usaha atau bisnis dengan kemauan atau kemampuan sendiri.⁴ Sering kali seseorang berhasrat untuk mendirikan usaha baru karna didorong oleh adanya peluang yang membentang dihadapantempat tinggalnya dan juga memiliki impian dan optimisme yang berlebihan. Untuk meredam adanya

³<http://www.gurupendidikan.com/pengertian-pendapatan-menurut-para-ahli-beserta-jenisnya/>.
Di Akses Pada Hari Rabu, 03 Mei 2017 Pukul 15:00

⁴ Leonardus Saiman, *Kewirausahaan*, 43

impian dan optimisme yang berlebihan tersebut, sebaiknya sebelum mengambil keputusan untuk menangkap peluang usaha baru, tidak salah jika seorang usahawan perlu melakukan evaluasi secara cermat atas peluang yang ada.⁵

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

⁵Leonardus Saiman, *Kewirausahaan*, 74

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Kriteria dan definisi diatas, yang dilakukan dan berlaku di Indonesia, juga dilakukan oleh negara asing dan lembaga international, hanya saja sedikit berbeda. Semisal:

Pengertian usaha kecil menengah dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan menengah memegang peranan penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil dan menengah tersebut. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, usaha kecil menengah juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Adapun yang menjadi bagian dari usaha kecil dan menengah adalah: sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perdagangan, sektor perdagangan, sektor pertambangan, pengolahan, sektor jasa, dan lainnya.

Ada beberapa pengertian usaha kecil menengah dari berbagai pendapat (Tulus Tambunan,1999), antara lain:

1. Pengertian usaha kecil berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total asset Rp60 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp600 juta.
2. Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.
3. Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu: (i) Usaha Rumag tangga mempunyai: 1-5 tenaga kerja, (ii) Usaha kecil menengah: 6-19 tenaga kerja, (iii) Usaha menengah: 20-29 tenaga kerja, (iv) Usaha besar: lebih dari 100 tenaga kerja.

4. Sedangkan dalam konsep Inpres UKM, yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria: (i) Asset Rp 50 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) Omset Rp 250 milyar

Sedangkan berdasarkan UU No.10/1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal yaitu berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, dan usaha kecil tradisional yaitu usaha yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni budaya. Universitas Sumatera Utara

Adapun cirri-ciri yang dimaksud dengan usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai criteria:

1. Asset Rp10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
2. Omset tahunan Rp50 milyar.⁶

Allah telah memerintahkan agar mencari rizki guna memenuhi kebutuhan yang telah tertulis dalam surat Al-Qashash ayat:77

⁶<http://iklanbaris-umkm.blogspot.co.id/p/walaupun-saya-bukan-seorang-pakar-dalam.html> Di Akses Pada Hari Rabu, 03 Mei 2017 Pukul 15.18 WIB

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(Q.S. Al-Qashash :77)⁷

Pandangan berwirausaha, sekarang tampaknya lebih maju dan memasuki sector pemerintahan, pemerintahan mulai menginginkan pengelolaan asset Negara secara wirausaha, memperhatikan aspek- aspek ekonomis, untung/ rugi dalam mejalankan, mengelola asset negara. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus meubah orientasinya terhadap rakyat. Pemerintah harus mengarahkan ketimbang mengayuh, harus menyuntikan persaingan kedalam pemberi layanan, pemerintah harus membiayai hasil bukan masukan, harus berorientasi pelanggan, bukan birokrasi. rakyat harus memeperoleh kepuasan dari segala sector pelayanan pemerintah. Jika rakyat puas maka rakyat tidak segan membayar pajak, retribusi, kontribusi dan sebagainya untuk kepentingan pemerintahannya.⁸

⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007)

⁸ Buchari ALMA, *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang usaha kecil menengah. Dalam sasarannya terwujudnya peningkatan dan kontribusi terhadap PDRB dan kontribusi terhadap PAD dan sektor industri, terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM. Kebijakan mengoptimalkan pemberdayaan potensi industri, perdagangan koperasi dan penanaman modal yang berwawasan lingkungan, peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah peningkatan pemanfaatan teknologi produksi, promosi dan informasi, meningkatkan sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Koperasi, Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).

Adapun pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haulan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat ke bendaan atas tanggungan bersama.

Suatu cabang ilmu tertentu akan dapat diakui keberadaannya sebagai ilmu baru yang berdiri sendiri adalah bilamana ilmu tersebut dapat melakukan

pengembangan terhadap ilmu induknya dan mempunyai perkotaan pada dasarnya adalah cabang dari Ilmu Ekonomi mikro maupun makro.⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab kesatu :Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, Identifikasi masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kajian teoritis mengenai perindustrian, perdangan dan koperasi serta mengenai teori pendapatan, penelitian terdahulu dan hipotesis.

Bab ketiga : Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari waktu penelitian, sampel populasi, jenis metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dan hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 15.0.

Bab kelima : Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

⁹ Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*,(Jakarta : Rajawali, 2014), 1

